



**KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK
ANTARA
ETNIS ROHINGYA DAN ETNIS RAKHINE DI MYANMAR
(STUDI KARAKTER KEPERIBADIAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO)**

Fatma Arya Ardani

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Humanitarian issues in Myanmar, in May 2012 was an issue that drew international attention, including Indonesia. The ethnic conflict between Rohingya and Rakhine led to crime against humanity. Following the humanitarian crisis in Myanmar, Indonesia promote peace between Rohingya and Rakhine. This study seeks to explain Indonesia's foreign policy in the case of ethnict conflict in Myanmar. This research employed idiosyncratic approach to explain the relationship between Indonesia's foreign policy and personal characters of the leader. Conciliatory character of Susilo Bambang Yudhoyono's leaderships affects participatory orientation in Indonesia's foreign policy. Susilo Bambang Yudhoyono as Indonesia president become an important actor in policy making to promote peace resolution in Myanmar. Using library research, this study found that the conciliatory character of Susilo Bambang Yudhoyono played an crucial factor behind the Indonesia's foreign policy in Myanmar

Keywords: *conciliatory, Indonesia's foreign policy, Myanmar, peace resolution, Susilo Bambang Yudhoyono*

1. Pendahuluan

Myanmar merupakan negara yang kaya akan keragaman etnis, dan agama. Myanmar memiliki 135 etnis. Etnis yang paling dominan di Myanmar adalah Bamar, Shan, Kayni, Rakhine, Chinese, Mon, dan Kachin (www.oxfordburmaalliance.org, 2009). Budha adalah agama nasional di Myanmar (<http://in.reuters.com>, 2013).

Etnis Rohingya adalah salah satu etnis yang tinggal di Myanmar beragama Islam, namun mereka tidak diakui sebagai warga negara dan mengalami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar. Etnis Rohingya tinggal di wilayah Arakan yang juga dihuni oleh etnis Rakhine, tetapi hubungan antara keduanya tidak harmonis. Pada Mei 2012, konflik terjadi konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine. Konflik tersebut bermula ketika beredar foto hasil forensik mengenai pembunuhan terhadap perempuan etnis Rakhine bernama Ma Thaida Htwe yang terjadi pada 28 Mei 2012 yang dilakukan oleh tiga

pemuda etnis Rohingya (www.internasional.kompas.com, 2012). Para Biksu dan masyarakat etnis Rakhine berdemonstrasi “No Rohingya”, membunuh etnis Rohingya, merusak bangunan ibadah, dan merusak tempat tinggal. Konflik tersebut mengakibatkan lebih dari 70 orang meninggal, lebih dari 3.000 bangunan rusak, dan hampir 60.000 orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia(www.rohingya.org, 2013) (www.bbc.co.uk, 2012).

Yudhoyono merupakan pemimpin yang membawa Indonesia aktif dalam berbagai penyelesaian konflik, di Filipina, Kamboja, Suriah, Libanon, dll. Menanggapi isu kemanusiaan Rohingya, Yudhoyono membawa Indonesia aktif dalam membantu penyelesaian konflik. Kebijakan Yudhoyono dilakukan dengan diplomasi bilateral dengan pemerintah Myanmar, memberikan bantuan kemanusiaan berupa dana maupun metode *sharing of expertise*, dan bantuan dalam bidang ekonomi yaitu *capacity building*. Selain melalui upaya bilateral, Yudhoyono juga membawa isu konflik Rohingya ini di OKI dan ASEAN.

Dari uraian diatas pertanyaan yang muncul adalah “mengapa Indonesia membuat kebijakan dalam membantu penyelesaian konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar?” pertanyaan ini penting karena dapat diketahui alasan Indonesia membuat kebijakan dalam membantu penyelesaian konflik antar etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar dan faktor yang melatar belakangi kebijakan tersebut, serta melihat apakah alasan dibuatnya kebijakan tersebut karena dipengaruhi oleh karakter Susilo Bambang Yudhoyono karena beliau banyak membuat kebijakan dalam membantu penyelesaian konflik internal suatu negara.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori *idiosyncratic* Hudson (2007) dan Hermann. Hudson (2007; 40), menyampaikan pemimpin menggunakan persepsi dan kognisi dalam menentukan kebijakan luar negeri, diperkuat dengan Hermann (1980) yang menyampaikan bahwa karakter pemimpin yang konsiliatif memberikan pengaruh pada orientasi kebijakan yang partisipatori. Tipe penelitian ini adalah eksplanatif yang menghubungkan antara sebab-akibat. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, dan *library research*. Penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pedahuluan, pembahasan dan kesimpulan. Dalam pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, metode penenitian. Sub bab pembahasan berisi analisa untuk menjawab rumusan masalah, dan sub bab kesimpulan berisi penutup yaitu hasil dari penelitian.

2. Pembahasan

Kebijakan Yudhoyono dalam membantu penyelesaian konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine adalah mengirim surat kepada Presiden Thein Sein, menerima kedatangan pengungsi Rohingya, bekerjasama dengan OKI dalam membantu penyelesaian konflik Rohingya, menjadi pelopor pembahasan konflik Rohingya pada forum KTT ASEAN, menunjuk Jusuf Kalla menjadi *Special Envoy*, menunjuk PMI sebagai lembaga yang mengkoordinir bantuan bagi etnis Rohingya, memberikan bantuan 1 Juta Dollat AS, memberikan bantuan kepada Pemerintah Myanmar dengan metode *Sharing of expertice* dengan memfasilitasi kunjungan delegasi Myanmar ke Aceh, dan berkontribusi dalam memajukan perekonomian Myanmar dengan mengirimkan BUMN Indonesia untuk berinvestasi di Myanmar, serta membentuk *Blue Books on Indonesia-Myanmar Capacity Building Partnership*. Dari kebijakan yang dibuat oleh Yudoyono diatas, terlihat bahwa beliau memiliki peran dominan dalam pembentukan kebijakan terkait penyelesaian konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar.

Berkaitan dengan peran dominan Yudhoyono, kebijakan Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik etnis di Myanmar dapat dikaitkan dengan karakter personal Yudhoyono. Karakter pemimpin konsiliatif menurut Hermann (1980) adalah pemimpin yang memiliki *sifat low nationalism, high conceptual complexity, little believe in own control, high need for affiliation, dan low distrust for other*. Sifat tersebut akan memberi pengaruh pada kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin.

2.1 Low Nationalism

Sifat *low nationalism* ditunjukkan pada kebijakan Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar. Yudhoyono membuat kebijakan menerima kedatangan pengungsi Rohingya, sedangkan Indonesia hanya memiliki 13 Rudenim. Hal tersebut kurang memperhatikan aspek keamanannya non tradisional Indonesia sendiri karena tingginya tingkat imigran gelap di Indonesia mengakibatkan meningkatnya kejahatan transnasional di Indonesia, seperti *people smuggling, human trafficking, dan trafficking in drugs* (www.polri.go.id).

Indonesia memang bekerjasama dengan lembaga UNHCR dan IOM dalam menangani pengungsi Rohingya, namun prosedur yang lama justru akan mengakibatkan kerugian material bagi Indonesia. Setiap tahunnya rata-rata pengungsi yang masuk ke Indonesia adalah 1500 orang, sedangkan UNHCR setiap tahun hanya mengeluarkan status pengungsi untuk 300 orang (www.hrw.or.id). Selain itu, terkait etnis Rohingya, tidak ada negara ketiga yang mau menerima etnis Rohingya (www.antaraneews.com).

Ditinjau dari kebijakan sebelumnya, Yudhoyono tidak agresif dalam isu-isu penting, namun beliau tetap mengedepankan upaya diplomasi meskipun permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan yang sensitif seperti batas wilayah Indonesia, dan terkait kekayaan Indonesia. Seperti pada isu perbatasan Indonesia-Malaysia mengenai Ambalat, pengakuan kebudayaan Indonesia oleh Malaysia, penangkapan awak KKP oleh Kepolisian Diraja Malaysia (www.kopertis12.or.id, 2010) (www.news.liputan6.com, 2012) (www.fkpmaritim.org, 2005).

2.2 High Conceptual Complexity

Yudhoyono adalah pemimpin yang tidak blak-blakan dalam menyampaikan pendapatnya, beliau sering menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti, namun sisi positifnya adalah beliau mampu membuat alternatif kebijakan. Pada kebijakan penyelesaian konflik etnis Rohingya, Yudhoyono mengeluarkan berbagai kebijakan.

Dalam menanggapi isu kemanusiaan Rohingya, Yudhoyono menggelar pidato kenegaraan pada 4 Agustus 2012 di Istana Bogor. Beliau menyampaikan bahwa “Pemerintah bukan hanya prihatin, tapi telah, sedang, dan akan terus melakukan berbagai upaya, baik itu diplomasi maupun upaya lain yang berkaitan dengan isu kemanusiaan atas etnis Rohingya yang ada di Myanmar.” (www.presidentri.go.id, 2012). Kalimat yang disampaikan Yudhoyono dalam pidato tersebut memberikan arti yang kurang jelas, karena Yudhoyono hanya menyampaikan dengan istilah saja, tidak menunjukkan secara nyata upaya apa saja yang dilakukan Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar.

Selain pada pidato kenegaraan pada 4 Agustus 2012, setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Thein Sein yang dilakukan disela pertemuan KTT ASEAN Yudhoyono kembali menyampaikan bahwa beliau mengutus Menlu Marty Natalegawa untuk aktif dan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Myanmar mengenai isu konflik etnis Rohingya. Beliau menyampaikan “arahannya adalah sesuai dengan apa yang telah dan sedang Indonesia lakukan” (www.republika.co.id). Yudhoyono terkesan tidak blak-

blakan dalam menyampaikan arahan yang beliau berikan kepada Marty Natalegawa sehingga menimbulkan ambiguitas kata. Yudhoyono kembali menyampaikan kalimat dengan maksud yang tidak jelas, beliau tidak menyampaikan secara gamblang upaya apa yang sedang dilakukan oleh Indonesia sehingga masyarakat umum tidak mengetahui kebijakan nyata Indonesia mengenai penyelesaian konflik di Myanmar.

Pada forum internasional, Yudhoyono juga menunjukkan kalimat-kalimat yang ambigu maknanya, seperti pada forum G 20 misalnya, Yudhoyono menyampaikan pandangan penyelesaian konflik berupa “*middle way approach*” (Yudhoyono, 2014: 714). Sifat *high conceptual complexity* ditunjukkan Yudhoyono ketika beliau menggunakan bahasa perumpamaan dalam menyampaikan pendapat, arahan yang diberikan juga tidak jelas karena sidatu sisi beliau menjelaskan agar menghindari serangan militer, namun disisi lain beliau meminta agar konflik tidak dibiarkan. Berikut pandangan Yudhoyono tersebut:

“.....Solusi jalan tengah yang saya tawarkan bukan pilihan hitam putih apakah serang atau tidak serang. Tetapi, paket solusi yang komprehensif. Pertama, penghentian kekerasan. Kedua, pemberian bantuan kemanusiaan. Ketiga, dilakukan proses politik yang demokratis, inklusif dan peaceful. Yang penting, jangan ada serangan militer konvensional yang justru bisa memperpanjang dan memperluas konflik disana. Tetapi juga jangan dibiarkan saja apa yang terjadi di negara itu. Genjatan senjata atau perdamaian adalah langkah pertama yang harus diwujudkan. Agar efektif, genjatan senjata itu mesti diawasi oleh peace-keeping forces yang diberi mandat oleh PBB (Yudhoyono, 2014: 714-715).”

2.3 Little Believe in Own Control

Yudhoyono menyadari bahwa mengenai keterbatasan yang dimiliki Indonesia sehingga dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar Yudhoyono melibatkan OKI dan ASEAN untuk aktif dalam penyelesaian konflik. Dibutuhkan dana dalam jumlah besar untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada korban konflik di Myanmar, tentunya Indonesia belum mampu dalam hal itu sehingga Yudhoyono melalui Menlu Marty Natalegawa mengajak OKI untuk berkontribusi dalam membantu penyelesaian konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. OKI melakukan kunjungan ke Myanmar pada 13 Agustus 2012 dan memberikan bantuan dana pembangunan 800 unit rumah untuk etnis Rohingya (www.republika.co.id, 2012).

Sifat *little believe in own control* juga ditunjukkan oleh Yudhoyono pada forum KTT ASEAN. Yudhoyono mengajak para anggota ASEAN agar pembahasan konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar tidak hanya berhenti pada forum multilateral ASEAN saja, namun berlanjut pada pertemuan bilateral dengan pemerintah Myanmar (www.rri.co.id, 2012). Menurut Yudhoyono, upaya yang dilakukan secara bersama-sama tentunya akan memberikan hasil yang lebih maksimal.

Jika ditinjau kembali dari kebijakan sebelumnya yang dibuat oleh Yudhoyono, beliau cenderung melibatkan pihak lain dalam kebijakan yang dibuatnya. Pada isu kartun Nabi Muhammad SAW, misalnya, Yudhoyono menggagas forum Global Intermedia Dialogue dengan tema *promoting freedom of expression and tolerance* yang diselenggarakan di Bali, namun beliau menggandeng Norwegia untuk menjadi co-inisiator dilangsungkannya *Global Intermedia Dialogue* dengan alasan Norwegia adalah negara yang aktif mendinginkan konflik internasional dengan menggunakan cara diplomasi yang kreatif (Djalal, 2009: 195- 196). Dari bukti dan analisa di atas, dapat dilihat bahwa Yudhoyono adalah pemimpin yang cenderung melibatkan pihak lain dalam kebijakan luar negeri.

2.4 *High Need for Affiliation*

Yudhoyono adalah pemimpin yang mementingkan arti hubungan pertemanan dan akan selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara di dunia, dan memperbanyak kerjasama dengan negara lain. Dalam menanggapi konflik etnis yang terjadi di Myanmar, Yudhoyono memberikan tanggapan dengan berhati-hati dan tidak menggunakan metode *hard power* karena menyadari hal tersebut dapat merusak hubungan baik Indonesia-Myanmar.

Yudhoyono lebih mengedepankan metode diplomasi, *sharing of expertise*, dan kerjasama *capacity building*. Karena menurutnya kebijakan tersebut dapat memberikan hasil yang lebih efektif. Komitmen kerjasama Yudhoyono dalam membantu penyelesaian konflik etnis Rohingya diperkuat dengan pemberian dana 1 juta Dollar AS untuk pembangunan sekolah dasar di Arakan, meningkatnya jumlah BUMN yang berekspansi ke Myanmar, dan dibentuknya *Blue Books on Indonesia-Myanmar Capacity Building Partnership 2013-2015* sebagai wujud komitmen politik Indonesia.

Jika ditinjau dari arah politik luar negeri Indonesia di era Yudhoyono yaitu “*all direct foreign policy*”, dan slogan “*a million friends zero enemy*” yang diusung oleh Yudhoyono membuktikan bahwa beliau memiliki sifat *high need for affiliation*. Selain slogan dan arah politik sifat *high need for affiliation* membuat Yudhoyono membawa Indonesia menjadi negara yang aktif dalam forum internasional seperti ASEAN, G 20 dan ASEM.

5.5 *Low Distrust for Other*

Telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa selama memimpin Indonesia Yudhoyono memiliki prinsip “*a million friends zero enemy*”. Dalam melakukan orientasi hubungan internasional, Yudhoyono menganggap semua negara adalah baik sehingga tidak ada kecurigaan Indonesia terhadap negara lain. Sifat *low distrust for other* erat kaitannya dengan sifat *high need for affiliation*, karena untuk bekerjasama diperlukan rasa saling percaya.

Terkait penyelesaian konflik etnis Rohingya, Yudhoyono juga menunjukkan sifatnya yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap pihak lain. Yudhoyono sepenuhnya percaya bahwa pemerintah Myanmar bisa menyelesaikan konflik internal tersebut dengan baik dan lebih manusiawi. Dalam pembuatan kebijakan penyelesaian konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar, Yudhoyono tidak langsung mengecam Myanmar, beliau lebih memilih berkomunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah Myanmar untuk mengetahui kondisi faktual yang terjadi di Myanmar. selain itu, Yudhoyono juga memegang teguh prinsip non intervensi dan membuat kebijakan yang sifatnya tidak memaksakan kepada Myanmar, beliau lebih menekankan pada aspek “*sharing of expertise*” terkait metode penyelesaian konflik. (www.republika.co.id, 2013).

Sifat *low distrust for other* juga ditunjukkan Yudhoyono ketika Amerika Serikat membuat kebijakan penambahan 20.000 pasukan marinir di Pulau Darwin. Jika China sebagai negara yang letaknya jauh dari Pulau Darwin menolak penambahan jumlah pasukan marinir di pulau tersebut dan menganggap tindakan Amerika Serikat adalah tidak tepat, Yudhoyono justru *welcome* terhadap kebijakan penambahan pasukan marinir di Pulau Darwin, seperti ungkapan Yudhoyono berikut; “Saya *welcome* saja karena memang diperlukan gerak cepat untuk itu” (www.jakartagreater.com). Pernyataan Yudhoyono tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kecurigaan sedikitpun terhadap Amerika Serikat, Yudhoyono begitu percaya bahwa misi Amerika Serikat adalah murni kemanusiaan dan tidak ada kepentingan lain.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Yudhoyono adalah pemimpin negara yang memiliki karakter personal konsiliatif. Karakter tersebut memberikan pengaruh pada orientasi kebijakan luar negeri Indonesia, yang menjadi fokus penelitian disini adalah kebijakan Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar. Pemimpin negara dengan karakter konsiliatif membawa negara yang dipimpinnya lebih sensitif dan responsif sehingga negaranya lebih aktif dalam hubungan internasional. Tujuannya adalah untuk mengetahui potensi menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain (Hermann, 1980). Berdasarkan paparan teori yang dikemukakan oleh Hermann (1980), karakter idiosinkretik merupakan faktor penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri negara. Maka karakteristik Yudhoyono itulah yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terkait penyelesaian konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar.

3. Kesimpulan

Yudhoyono adalah pemimpin memiliki karakter konsiliatif yang dicirikan dengan sifat *low nationalism, little believe in own control, high conceptau complexity, high need for affiliation*, dan *low distrust for other*. Karakter tersebut memberikan pengaruh pada orientasi kebijakan Indonesia dimasa Yudhoyono yang cenderung *partisipatory*.

Karakter konsiliatif Yudhoyono memberikan pengaruh pada setiap kebijakan yang dibuatnya dalam membantu penyelesaian konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar, sehingga kebijakan yang dibuat oleh Yudhoyono lebih mengedepankan metode penyelesaian konflik secara damai yang dilakukan dengan cara *soft* diplomasi, kerjasama, dan tetap memegang prinsip non intervensi. Pemimpin dengan karakter konsiliatif akan membawa negaranya aktif dalam dunia internasional, dan dalam isu konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine ini Yudhoyono terbukti membawa Indonesia menjadi lebih aktif dengan mengeluarkan berbagai inisiatif kebijakan membantu penyelesaian konflik yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral bersama OKI dan ASEAN. Kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Yudhoyono dalam membantu penyelesaian konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar cenderung bersifat *problem solving*.

Daftar Pustaka

- Abdul Andrea. Apa Dibalik Rencana Pembangunan Pangkalan Militer Amerika Serikat di Darwin?. http://www.kompasiana.com/duljonmaster/apa-dibalik-rencana-pembangunan-pangkalan-militer-amerika-serikat-di-darwin_55114a6a8133115c3bbc7b3f. Akses: 28 Mei 2015
- Adhidarta Syaifudin. http://www.kompasiana.com/syaifud_adidharta/indonesia-vs-malaysia-fenomena-perbatasan-negara-berdaulat5500ae1a813311501afa768. Indonesia VS Malaysia Fenomena Perbatasan Negara Kedaulatan. Akses: 28 Mei 2015
- Arifin Ridwan. Bom Waktu Imigran Gelap Di Indonesia. <http://hukum.kompasiana.com/2013/07/15/bom-waktu-imigran-gelap-di-indonesia-577017.html>. Akses: 11 Februari 2015
- Australia Radio. Ketidak Jelasan Nasib Suku Rohingya Di Myanmar. <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2012-07-13/ketidakjelasan-nasib-suku-rohingya-di-myanmar/979234>. Akses: 15 Maret 2014
- ASEAN Mulai Pembicaraan di Phnom Penh. Kamboja <http://m.voaindonesia.com/a/asean-mulai-pembicaraan-di-phnom-penh-kamboja/1548822.html>. Akses: 15 Maret 2014

- Awaluddin Hamid, Sumbu Konflik Myanmar. <http://internasional.kompas.com/read/2012/08/23/08441353/Sumbu.Konflik.Myanmar>. Akses: 15 Maret 2014
- Bakti Nusa Ikrar, Imigran Gelap Akan Jadi Masalah. <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/294>. Akses: 11 Februari 2015
- Chan Aye. (2005). *The Development of A Muslim Enclave In Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar)*. SOAS Bulletin of Burma Research. vol 3, No. 2, Autumn 1ssn 1479-8484
- Delegates Hail Human Rights Improvements in Myanmar as Third Committee Approves 8 Draft Resolutions, including 4 Country-Specific Texts. <http://www.un.org/press/en/2013/gashc4091.doc.htm>. Akses: 23 Juni 2014
- Djalal Patti Dino. (2009). *Harus Bisa Seni Memimpin Ala SBY*. Indonesia: Red & White Publishing
- Ethnic Nationalities of Burma. <http://www.oxfordburmaalliance.org/ethnic-groups.html>. Akses: 15 Maret 2015
- Fortify Rights. (2012). *Policies of Persecution Ending Abusive State Policies Against Rohingya Muslims in Myanmar*
- G 20. <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=11&P=Multilateral&l=id>. Akses: 28 Mei 2015
- Ghafur Fakri Muhammad. Minoritas Muslim Dalam Pusaran Konflik Myanmar. <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/824-minoritas-muslim-dalam-pusaran-konflik-myanmar.html>. Akses: 15 Maret 2014
- Haryanto Dwi Fefy. TNI Kirim 1169 Pasukan Ke Lebanon. <http://nasional.sindonews.com/read/690223/14/tni-kirim-1-169-prajurit-ke-lebanon>. Akses: 30 Maret 2014
- Hermann G. Margaret. (1980). *Explaining Foreign Policy Behavior Using The Personal Characteristics of Political Leaders*. International Studies Quarterly, Vol. 24, No. 1 (Mar., 1980), pp. 7-46. Blackwell
- Human Rights Watch. (2014). *"All You Can Do Is Pray" Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing Of Rohingya Muslims In Burma's Arakan States*
- Indonesia Ingin Bantu Selesaikan Konflik Rohingya. <http://old.setkab.go.id/berita-8333-indonesia-ingin-bantu-selesaikan-konflik-rohingya.html>. Akses: 30 April 2014
- Indonesia Terus Lakukan Diplomasi untuk Selesaikan Kasus Rohingya. <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2012/08/04/8185.html>. Akses: 15 Maret 2014
- JRS. (2013). Pengungsi Dan Pencari Swaka Di Indonesia Kunjungi Myanmar. Presiden SBY Bawa Misi Ekonomi. http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6971&Itemid=55. Akses: 18 November 2014
- Lwin San Nay. *The Rohingya need more international support to restore their citizenship rights* <http://www.the-platform.org.uk/2012/07/12/burma%E2%80%99s-rohingya-a-denial-of-citizenship-and-human-rights/>. Akses: 15 Maret 2014
- PIARA. (2012). Rohingya 101 Data dan Fakta
- Presiden SBY Tawarkan Bantuan Kemanusiaan Ke PM Myanmar. <http://old.setkab.go.id/berita-6397-presiden-sby-tawarkan-bantuan-kemanusiaan-ke-pm-myanmar.html>. Akses: 30 Maret 2014
- Yudhoyono: JK Utusan Khusus Untuk Rohingya, <http://sp.beritasatu.com/home/yudhoyono-jk-utusan-khusus-untuk-rohingya/23588>. Akses: 15 Januari 2015
- Yudhoyono Bambang Susilo. (2014). *Selalu Ada Pilihan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas